



# 2024

## Laporan Keuangan Tahunan (*Audited*)

**DIPA-023.18.2.677592**

**Politeknik Negeri Banyuwangi**

Jalan Raya Jember KM. 13, Labanasem, Kabat-Banyuwangi



## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian /Lembaga yang dipimpinnya.

Politeknik Negeri Banyuwangi adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) Politeknik Negeri Banyuwangi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kaidah-Kaidah Pengelolaan Keuangan yang Sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (023.18.2.677592/2024) ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan, khususnya sebagai pertanggungjawaban yang memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Politeknik Negeri Banyuwangi. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Banyuwangi, 6 Mei 2025  
Kuasa Pengguna Anggaran

  
M. Shofi'ul Amin, S.T., M.T.  
NIP 198605212015041002



## DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ATB	: Aset Tak Berwujud
ATM	: Automatic Teller Machine
BAST	: Berita Acara Serah Terima
BMD	: Barang Milik Daerah
BMN	: Barang Milik Negara
BOPTN	: Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri
BPSDM	: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
BUN	: Bendahara Umum Negara
CaLK	: Catatan atas Laporan Keuangan
Covid	: Corona Virus Disease
CPNS	: Calon Pegawai Negeri Sipil
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
GLP	: General Ledger Pelaporan
IPI	: Iuran Pengembangan Institusi
IPTEK	: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
IPTEKS	: Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni
K/L	: Kementerian/Lembaga
KDP	: Konstruksi Dalam Pengerjaan
KPKNL	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
KPPN	: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KUN	: Kas Umum Negara
LO	: Laporan Operasional
LPE	: Laporan Perubahan Ekuitas
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
LSP	: Lembaga Sertifikasi Profesi
MKDU	: Mata Kuliah Dasar Umum
NUP	: Nomor Urut Pendaftaran
PCR	: Polymerase Chain Reaction
PNBP	: Pendapatan Negara Bukan Pajak
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
POK	: Petunjuk Operasional Kegiatan
POLIWANGI	: Politeknik Negeri Banyuwangi
PPNP	: Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
PPP	: Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
PRODI	: Program Studi
RM	: Rupiah Murni
RUTR	: Rencana Umum Tata Ruang
SAI	: Sistem Akuntansi Instansi
SAIBA	: Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua
SAP	: Sistem Akuntansi Pemerintahan
SBMPN	: Seleksi Bersama Masuk Politeknik Negeri
SBSN	: Surat Berharga Syariah Negara



SIMAK	: Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi
SK	: Surat Keputusan
SP2D	: Surat Perintah Pencairan Dana
SPI	: Satuan Pengawas Internal
SPJ	: Surat Pertanggungjawaban
SPM	: Surat Perintah Membayar
SPP	: Sumbangan Penunjang Pendidikan
TA	: Tahun Anggaran
TOEFL	: Test of English as a Foreign Language
TP/TGR	: Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
TPA	: Tagihan Penjualan Angsuran
TUP	: Tambahan Uang Persediaan
UKT	: Uang Kuliah Tunggal
UP	: Uang Persediaan
UPT	: Unit Pelayanan Teknis
YPTB	: Yayasan Pendidikan Tinggi Banyuwangi



## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) Politeknik Negeri Banyuwangi DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (023.18.2.677592/2024) yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Banyuwangi, 6 Mei 2025  
Kuasa Pengguna Anggaran



M. Shofi'ul Amin, S.T., M.T.  
NIP 198605212015041002



**PERNYATAAN TELAH DIREVIEW  
LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
(AUDITED)  
POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI**

Kami telah mereview Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) Politeknik Negeri Banyuwangi DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (023.18.2.677592/2024) berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir s.d.31 Desember 2024. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Politeknik Negeri Banyuwangi.

Review bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Review mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan review kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas telah disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Banyuwangi, 6 Mei 2025  
Ketua Satuan Pengawas Internal,



Masetya Mukti, S.ST., M.M.  
NIP. 198904092019031012

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) Politeknik Negeri Banyuwangi DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (023.18.2.677592/2024) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp23.572.136.161,- atau mencapai 92,28% dari alokasi PNBP sebesar Rp25.544.600.000,-.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp62.846.068.165,- atau mencapai 92,61% dari alokasi anggaran yang sebesar Rp67.861.933.000,-. Jumlah realisasi tersebut terdiri dari:

- Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp16.511.965.880,- atau mencapai 99,49% dari alokasi anggaran yang sebesar Rp16.596.009.000,-;
- Realisasi Belanja Barang sebesar Rp 26.491.663.788,- atau mencapai 88,48% dari alokasi anggaran yang sebesar Rp29.942.169.000,-; dan
- Realisasi Belanja Modal sebesar Rp19.842.438.497 atau mencapai 93,05% dari alokasi anggaran yang sebesar Rp21.323.755.000,-.

### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp438.494.058.577,- yang terdiri dari:

- Aset Lancar sebesar Rp1.350.052.426,-;
- Aset Tetap sebesar Rp436.522.548.782,-; dan
- Aset Lainnya sebesar Rp621.457.369,-.

Jumlah Kewajiban per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.973.179.278,- yang meliputi Kewajiban Jangka Pendek berupa:

- Utang kepada Pihak Ketiga Rp457.944.578,- dan
- Pendapatan Diterima Dimuka Rp1.515.234.700,-.

Sementara itu Nilai Ekuitas per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp436.520.879.299,-.

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp25.758.858.011,-; sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp55.596.933.090,- sehingga terdapat Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional sebesar (Rp29.838.075.079,-). Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional adalah sebesar (Rp16.380.000,-). Sehingga entitas mengalami Surplus/(Defisit)-LO sebesar (Rp29.821.695.079,-).

### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah ekuitas per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp427.141.713.474,-; dengan Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp29.821.695.079,-). Koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas sebesar (Rp62.903.550,-) dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp39.263.764.454,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp436.520.879.299,-.



## 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.



**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI**  
**TABEL 1**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**Untuk Periode Yang Berakhir per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024			31 DESEMBER 2023	
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI BELANJA	REALISASI	NAIK (TURUN) %
<b>PENDAPATAN</b>	<b>B.1</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	<b>B.1.1</b>	25.544.600.000	23.572.136.161	92,28	21.940.109.404	7,44
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>25.544.600.000</b>	<b>23.572.136.161</b>	<b>92,28</b>	<b>21.940.109.404</b>	<b>7,44</b>
<b>BELANJA</b>	<b>B.2</b>					
Belanja Operasi						
Belanja Pegawai	<b>B.2.1</b>	16.596.009.000	16.511.965.880	99,49	13.437.083.695	22,88
Belanja Barang	<b>B.2.2</b>	29.942.169.000	26.491.663.788	88,48	22.052.258.494	20,13
<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>		<b>46.538.178.000</b>	<b>43.003.629.668</b>	<b>92,41</b>	<b>35.489.342.189</b>	<b>21,17</b>
Belanja Modal	<b>B.2.3</b>					
Belanja Modal Tanah	<b>B.2.3.1</b>	1.948.080.000	1.932.690.000	99,21	29.949.000	6.353,27
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	<b>B.2.3.2</b>	10.709.331.000	9.408.576.300	87,85	14.678.897.500	(35,90)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	<b>B.2.3.3</b>	8.055.844.000	7.891.668.197	97,96	75.612.735.741	(89,56)
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	<b>B.2.3.4</b>	455.000.000	454.083.000	99,80	8.147.045.080	(94,43)
Belanja Modal Lainnya	<b>B.2.3.5</b>	155.500.000	155.421.000	99,95	3.107.713.299	(95,00)
<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>		<b>21.323.755.000</b>	<b>19.842.438.497</b>	<b>93,05</b>	<b>101.576.340.620</b>	<b>(80,47)</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>67.861.933.000</b>	<b>62.846.068.165</b>	<b>92,61</b>	<b>137.065.682.809</b>	<b>(54,15)</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

## II. NERACA

### POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI TABEL 2 NERACA

Untuk Periode Yang Berakhir per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>	<b>C.1</b>			
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.1	0	2.000.000	(100,00)
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1.2	2.766.515	2.981.825	(7,22)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.1.3	79.333.333	0	100,00
Piutang Bukan Pajak	C.1.4	250.500.000	354.050.000	(29,25)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.5	(13.730.750)	(16.514.250)	(16,86)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)		236.769.250	337.535.750	(29,85)
Persediaan	C.1.6	1.031.183.328	1.049.302.842	(1,73)
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>1.350.052.426</b>	<b>1.391.820.417</b>	<b>(3,00)</b>
<b>ASET TETAP</b>	<b>C.2</b>			
Tanah	C.2.1	203.782.136.580	201.819.497.580	0,97
Peralatan dan Mesin	C.2.2	118.487.907.274	107.058.415.131	10,68
Gedung dan Bangunan	C.2.3	210.631.850.159	203.829.002.289	3,34
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	9.039.583.080	8.727.720.080	3,57
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	7.465.288.089	4.692.694.573	59,08
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	0	2.701.792.516	(100,00)
AKUMULASI PENYUSUTAN	C.2.7	(112.884.216.400)	(99.562.094.328)	13,38
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		<b>436.522.548.782</b>	<b>429.267.027.841</b>	<b>1,69</b>
<b>ASET LAINNYA</b>	<b>C.3</b>			
Aset Tak Berwujud	C.3.1	2.091.661.717	2.279.590.717	(8,24)
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.3.2	365.346.995	0	100,00
Aset Lain-lain	C.3.3	0	5.040.200	(100,00)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	C.3.4	(1.835.551.343)	(1.888.678.018)	(2,81)
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>		<b>621.457.369</b>	<b>395.952.899</b>	<b>56,95</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>438.494.058.577</b>	<b>431.054.801.157</b>	<b>1,73</b>
<b>KEWAJIBAN</b>	<b>C.4</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>C.4.1</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1.1	457.944.578	99.369.782	360,85
Pendapatan Diterima Dimuka	C.4.1.2	1.515.234.700	3.813.717.901	(60,27)
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		<b>1.973.179.278</b>	<b>3.913.087.683</b>	<b>(49,57)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>1.973.179.278</b>	<b>3.913.087.683</b>	<b>(49,57)</b>
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	C.5	436.520.879.299	427.141.713.474	2,20
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>436.520.879.299</b>	<b>427.141.713.474</b>	<b>2,20</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>438.494.058.577</b>	<b>431.054.801.157</b>	<b>1,73</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*



### III. LAPORAN OPERASIONAL

#### POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI

#### TABEL 3

#### LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Periode Yang Berakhir per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>D.1</b>			
<b>PENDAPATAN</b>	<b>D.1.1</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1.1.1	25.758.858.011	21.488.900.573	19,87
<b>JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL</b>		<b>25.758.858.011</b>	<b>21.488.900.573</b>	<b>19,87</b>
<b>BEBAN</b>	<b>D.1.2</b>			
Beban Pegawai	D.1.2.1	16.511.807.888	13.434.475.172	22,91
Beban Persediaan	D.1.2.2	912.350.098	728.230.306	25,28
Beban Barang dan Jasa	D.1.2.3	21.356.581.820	19.097.828.136	11,83
Beban Pemeliharaan	D.1.2.4	2.689.273.665	1.441.113.213	86,61
Beban Perjalanan Dinas	D.1.2.5	1.547.178.822	1.584.017.516	(2,33)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.1.2.6	12.579.740.797	9.275.264.439	35,63
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.1.2.7	0	13.512.000	(100,00)
<b>JUMLAH BEBAN OPERASIONAL</b>		<b>55.596.933.090</b>	<b>45.574.440.782</b>	<b>21,99</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(29.838.075.079)</b>	<b>(24.085.540.209)</b>	<b>23,88</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>D.2</b>			
<b>SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR</b>	<b>D.2.1</b>			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0	71.222.222	(100,00)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0	81.193.510	(100,00)
<b>JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR</b>		<b>0</b>	<b>(9.971.288)</b>	<b>(100,00)</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA</b>				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		16.380.000	2.089.292	684,00
<b>JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA</b>		<b>16.380.000</b>	<b>2.089.292</b>	<b>684,00</b>
<b>JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>16.380.000</b>	<b>(7.881.996)</b>	<b>(307,82)</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT) - LO</b>		<b>(29.821.695.079)</b>	<b>(24.093.422.205)</b>	<b>23,78</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*



#### IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI

#### TABEL 4

### LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Periode Yang Berakhir per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
EKUITAS AWAL	E.1	427.141.713.474	336.112.627.674	27,08
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	E.2	(29.821.695.079)	(24.093.422.205)	23,78
<b>KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS</b>	<b>E.3</b>			
Koreksi atas Reklasifikasi	E.3,1	0	6.641.700	(100,00)
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3,2	(75.854.600)	(9.707.100)	681,43
Koreksi Lain-Lain	E.3,3	2.783.500	0	100,00
<b>JUMLAH KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS</b>		<b>(73.071.100)</b>	<b>(3.065.400)</b>	<b>2.283,74</b>
<b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>	<b>E.4</b>			
Ditagihkan ke Entitas Lain		62.846.068.165	137.065.682.809	(54,15)
Diterima Dari Entitas Lain		(23.572.136.161)	(21.940.109.404)	7,44
<b>JUMLAH TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>		<b>39.273.932.004</b>	<b>115.125.573.405</b>	<b>(65,89)</b>
<b>KENAIKAN/PENURUSAN EKUITAS</b>		<b>9.379.165.825</b>	<b>91.029.085.800</b>	<b>(89,70)</b>
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>E.5</b>	<b>436.520.879.299</b>	<b>427.141.713.474</b>	<b>2,20</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) Politeknik Negeri Banyuwangi ini kami sajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan akun-akun Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

### A. Penjelasan Umum

#### Dasar Hukum

#### A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;



12. Peraturan Menteri Keuangan No. 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
13. Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 Tentang Bagan Akun Standar;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2013 Tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
17. Peraturan Menteri Keuangan 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 270/PMK.05/2014 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan barang Milik Negara;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Per-222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
22. Peraturan Menteri Keuangan No. 220/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;



26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
27. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 13 Tahun 2015 tentang Penyajian Laporan Keuangan Satuan Kerja Badan Layanan Umum;
28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16/2008 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di lingkungan Depdiknas;
29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2011 tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di lingkungan Kemdiknas;
31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada PTN di lingkungan Kemendikbud;
33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
34. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 258/M/2014 tentang Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang Milik Negara di Lingkungan Kemendikbud;
35. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
36. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 61/PB/2009 Tentang Penyelesaian Kelebihan Pengembalian Uang Persediaan;



37. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 80 Tahun 2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
38. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
39. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor Per-07/KN/2009 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara.
40. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar;
41. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/ 2020 tanggal 27 April 2020 hal Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
42. Peraturan Menteri Keuangan nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
43. Peraturan Menteri Keuangan nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
44. Surat Menteri Keuangan atas nama Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-381/MK.2/2024 tanggal 5 November 2024 Perihal Penunjukan Kementerian/Lembaga Pengampu pada Kementerian/Lembaga yang mengalami Perubahan;
45. Surat Menteri Keuangan atas nama Direktur Jenderal Anggaran Nomor S381/MK.2/2024 tanggal 5 November 2024 Perihal Penunjukan Kementerian/Lembaga Pengampu pada Kementerian/Lembaga yang mengalami Perubahan;
46. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-210/PB/2024 perihal Jadwal Penyusunan dan Pemeriksaan LKKL Tahun 2024 serta Pelaksanaan Digitalisasi Dokumen Pengelolaan Keuangan Negara;
47. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-221/PB/2024 perihal Petunjuk Teknis Akuntansi 25: Persediaan dalam Proses, Persediaan yang Tidak dikuasai; dan KDP/ATB dalam Pengerjaan yang Dihentikan;
48. Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran nomor S-738/PB.2/2024 perihal Ketentuan Pelaporan Data Capaian Output dan Penilaian IKPA Belanja K/L Tahun 2024;

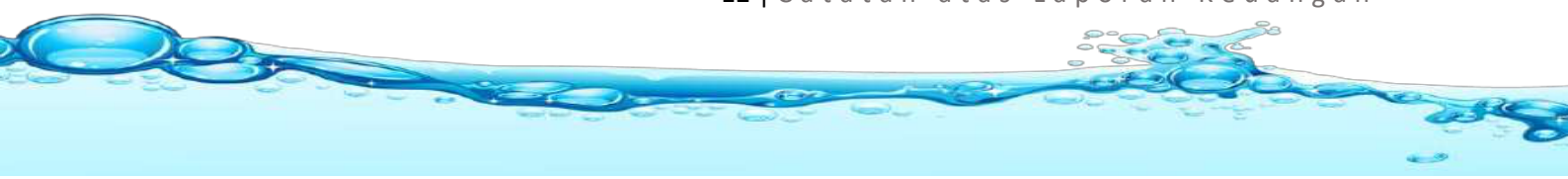
49. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-3/PB/2025 tanggal 1 Januari 2025 perihal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024 (Audited);
50. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 0274/A.A2/KU.03.02/2025 hal Langkah-langkah dan Kebijakan Penyusunan Laporan Keuangan Kemendikbudristek Tahun 2024;
51. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek Nomor 0066/D1/KU.03.02/2025 tanggal 13 Januari 2025 Hal Langkah-langkah dan Kebijakan Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

*Profil dan  
Kebijakan  
Teknis  
Politeknik  
Negeri  
Banyuwangi*

## **A.2 Profil dan Kebijakan Teknis Politeknik Negeri Banyuwangi**

Politeknik Negeri Banyuwangi merupakan salah satu perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dengan berbasis vokasi dan keahlian. Menurut UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa Pendidikan Vokasi merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program terapan bahkan dapat dikembangkan sampai program magister terapan ataupun program doktor terapan. Ciri khas sistem pendidikan politeknik adalah perkuliahan yang menggunakan sistem paket dengan porsi praktikum atau praktek yang lebih besar dibandingkan teori agar lulusannya siap kerja. Selain itu sistem pendidikan ini juga didukung oleh metode dan materi pembelajaran yang sesuai, meliputi bidang hard skill dan soft skill.

Politeknik Negeri Banyuwangi juga menjalin kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta, pemerintah ataupun BUMN untuk menempekan mahasiswa dalam program praktek kerja dan magang industri. Sehingga lulusan Politeknik Negeri Banyuwangi diharapkan dapat belajar secara langsung dari praktisi atau dunia industri. Dan mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikannya akan mendapatkan gelar Ahli Madya yang disingkat A.Md. untuk program Diploma Tiga, sedangkan untuk lulusan program Diploma Empat adalah Sarjana Sains Terapan yang disingkat S.ST.



Politeknik Negeri Banyuwangi saat ini mengelola beberapa unit pelayanan pendidikan, di antaranya berupa:

- 1) Enam belas Program Studi, meliputi:
  1. Program Studi D-IV Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak;
  2. Program Studi D-IV Teknologi Rekayasa Komputer;
  3. Program Studi D-IV Bisnis Digital;
  4. Program Studi D-IV Teknologi Rekayasa Manufaktur;
  5. Program Studi D-IV Teknologi Pengolahan Hasil Ternak;
  6. Program Studi D-IV Teknologi Produksi Ternak;
  7. Program Studi D-IV Budidaya Perikanan/Teknologi Akuatur;
  8. Program Studi D-IV Agribisnis;
  9. Program Studi D-IV Pengembangan Produk Agroindustri;
  10. Program Studi D-IV Teknologi Produksi Tanaman Pangan;
  11. Program Studi D-IV Manajemen Bisnis Pariwisata;
  12. Program Studi D-IV Pengelolaan Perhotelan;
  13. Program Studi D-IV Teknik Manufaktur Kapal;
  14. Program Studi D-IV Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan;
  15. Program Studi D-IV Destinasi Pariwisata; dan
  16. Program Studi D-III Teknik Sipil.
- 2) Dua pusat terdiri atas: Pusat Penjaminan Mutu (P2M), dan Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M).
- 3) Tiga Unit Pelayanan Teknis terdiri dari: UPT Kewirausahaan dan Inkubistek, UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi, UPT Bahasa dan Budaya, serta UPT Perpustakaan.
- 4) Empat Unit terdiri dari: Unit Job Placement Center (JPC), Unit Kerja sama dan Urusan Internasional (KUI), Unit Kesehatan Kampus (UKK), dan Unit Hubungan Masyarakat.
- 5) Satuan Pengawas Internal (SPI).
- 6) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

Jumlah Mahasiswa Aktif per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebanyak 3.543 orang. Jumlah Tenaga Pendidik sebanyak 110 Dosen PNS, 26 Dosen PPPK dan 7 Dosen Non PNS, 18 Dosen luar biasa MKDU, sedangkan jumlah Tenaga Kependidikan sebanyak 33 tenaga PNS, 20 tenaga PPPK dan 26 tenaga Non PNS. Untuk membiayai program dan kegiatan sebagaimana tersebut di atas didukung dengan sumber dana APBN yaitu Rupiah Murni dan PNBPN. Sumber dana Rupiah Murni terdiri atas: Operasional rutin dan BOPTN. Sedangkan PNBPN berasal dari: Pendapatan biaya pendidikan, Pendapatan ujian/seleksi masuk pendidikan, dan Pendapatan pendidikan lainnya.

Visi Politeknik Negeri Banyuwangi adalah:

**“Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi vokasional yang bermutu,  
berkemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovatif, dan berdaya  
saing“**

Misi Politeknik Negeri Banyuwangi adalah:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu sesuai standar nasional pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan profesional;
- 2) Melaksanakan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas Sivitas Akademika sesuai dengan permasalahan industri dan masyarakat;
- 3) Meningkatkan akses, relevansi, kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan inovasi untuk sumber daya manusia yang berkualitas.

Tujuan Politeknik Negeri Banyuwangi adalah:

- 1) Mencerdaskan kehidupan masyarakat sekitar melalui kegiatan pendidikan dan menghasilkan lulusan berkualitas dan berdaya saing;
- 2) Melaksanakan penelitian terapan dalam rangka meningkatkan kualitas Sivitas Akademika sesuai kebutuhan industri dan masyarakat;

- 3) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 4) Membangun jiwa kewirausahaan di kalangan Sivitas Akademika yang dapat menumbuhkembangkan sektor industri kecil, menengah, dan atas;
- 5) Memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat berazaskan pemerataan dan keadilan;
- 6) Mewujudkan keberlanjutan institusi dengan mengembangkan program-program kemitraan dengan masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan; dan
- 7) Memberi penghargaan kepada masyarakat yang mempunyai keahlian tertentu sesuai dengan tingkatan kompetensinya.

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

### **A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) Politeknik Negeri Banyuwangi merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Politeknik Negeri Banyuwangi. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta pertanggungjawaban anggaran dan pendapatan belanja negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara.

*Basis  
Akuntansi*

### **A.4. Basis Akuntansi**

Politeknik Negeri Banyuwangi menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

**Dasar  
Pengukuran****A.5. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Politeknik Negeri Banyuwangi dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

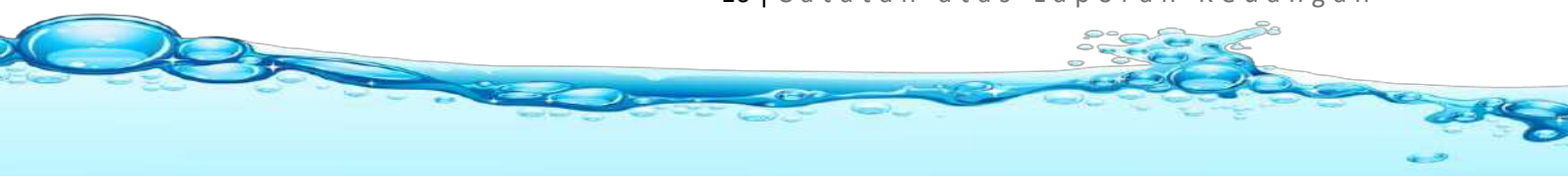
Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

**Kebijakan  
Akuntansi****A.6. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan:

1. Buku Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 0250/D1/KU.03.02/2024 tanggal 17 Januari 2024 Hal Langkah-langkah dan Kebijakan Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang merupakan entitas pelaporan dari Politeknik Negeri Banyuwangi. Disamping itu, dalam



penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Politeknik Negeri Banyuwangi adalah sebagai berikut:

*Pendapatan  
– LRA*

**(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-  
LO*

**(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

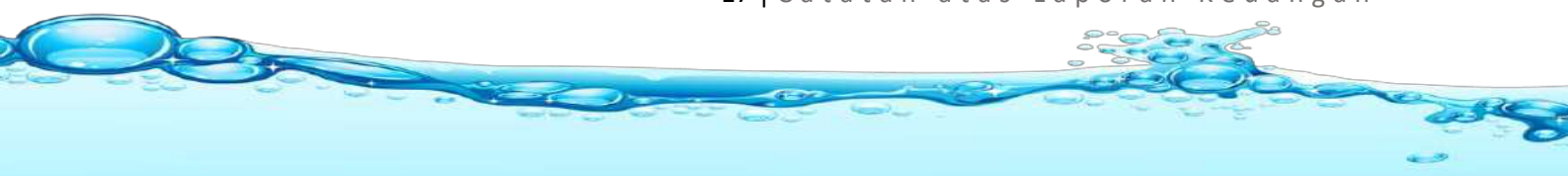
Secara khusus pengakuan pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan;
2. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa; dan
3. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

*Belanja*

**(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang



bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya di klasifikasikan berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### *Beban*

#### **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya di klasifikasikan berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### *Aset*

#### **(5) Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

##### **a. Aset Lancar**

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- Diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual

dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau

- Berupa kas dan setara kas.

Aset lancar disajikan berdasarkan urutan likuiditas, meliputi:

#### 1. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh BUN dan K/L. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan; Setara kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Kas di Politeknik Negeri Banyuwangi terdiri atas saldo kas di rekening bendahara pengeluaran, saldo rekening bendahara penerimaan, dan saldo uang tunai.

#### 2. Piutang Bukan Pajak

Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya Surat Keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang yang timbul dari tunggakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI). Pengakuan piutang dari Pendapatan Uang Kuliah Tunggal (UKT) diakui saat mahasiswa telah melakukan pendaftaran ulang namun belum dilakukan pembayaran, dan telah jatuh tempo. Sedangkan Piutang Iuran Pengembangan Institusi (IPI) diakui dan dicatat saat tanggal pembayaran yang disepakati pada perikatan/perjanjian sebesar nilai sisa uang dari Iuran Pengembangan Institusi (IPI) tidak/belum dilakukan pembayaran sesuai perjanjian.

Pengukuran Piutang dari Pendapatan Pendidikan, diukur berdasarkan surat perjanjian kewajiban keuangan mahasiswa sesuai syarat yang ditetapkan berupa Surat Ketetapan Piutang oleh Pimpinan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam ketentuan atau surat perjanjian tersebut. Pencatatan piutang dilakukan oleh unit tersendiri dengan data yang berasal dari Bendahara Penerimaan, bagian administrasi kemahasiswaan pada bidang akademik dan data terkait lainnya. Untuk piutang pendidikan, Bendahara Penerimaan melakukan rekonsiliasi dengan pihak akademik untuk memastikan adanya mahasiswa yang terdaftar kuliah tetapi belum membayar kewajiban keuangannya. Rekonsiliasi ini juga dimaksudkan untuk mengetahui jumlah mahasiswa yang benar-benar mendapatkan pelayanan pendidikan. Dengan demikian jumlah mahasiswa aktif menjadi akurat serta Pendapatan dan Piutang yang dicatat pada proses akuntansi juga akurat.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihan piutang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5  
Perhitungan Penyisihan Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/DJKN	100%

3. Piutang Lainnya merupakan transaksi pengembalian belanja TAYL, yang sampai dengan tanggal 31 Desember TAYL, kas tersebut masih berada di pihak ketiga dan belum dikembalikan ke kas negara atau Bendahara Pengeluaran.
4. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.
5. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Politeknik Negeri Banyuwangi, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional di Politeknik Negeri Banyuwangi. Yang termasuk dalam persediaan ini yaitu: barang habis pakai, barang tak habis pakai, dan barang bekas pakai.
- b) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misal: bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, obat-obatan, persediaan bahan kimia untuk produksi maupun laboratorium, bahan baku konstruksi bangunan yang akan diserahkan kepada masyarakat.
- c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, contoh: konstruksi dalam pengerjaan yang akan diserahkan kepada masyarakat, alat-alat pertanian setengah jadi/barang hasil proses produksi yang belum selesai yang akan diserahkan kepada masyarakat.
- d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Politeknik Negeri Banyuwangi, contoh: Hewan, tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan dinilai dengan menggunakan metode First In First Out (FIFO), dengan barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang

pertama kali keluar. Dengan metode ini saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan masing-masing. Penilaian Persediaan menggunakan metode FIFO diterapkan mulai tahun 2021 secara prospektif, setelah Pemerintah menerapkan metode Harga Perolehan Terakhir pada tahun-tahun sebelumnya.

Penyajian persediaan di neraca pada bagian aset lancar. Dalam rangka penyajian persediaan di neraca, Politeknik Negeri Banyuwangi melaksanakan *stock opname* (inventarisasi fisik) persediaan yang dilakukan setiap semester. Untuk selanjutnya berdasarkan inventarisasi fisik tersebut dilakukan penyesuaian data nilai persediaan.

Catatan atas Laporan Keuangan untuk persediaan mengungkapkan:

- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- b) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- c) Penjelasan atas selisih antara pencatatan dengan hasil inventarisasi fisik; dan
- d) Jenis, jumlah dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

#### **b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a) Pengeluaran untuk peralatan dan mesin atau aset tetap renovasi peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan atau aset tetap renovasi gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
  - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, konstruksi dalam pengerjaan atau aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
  - Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal ini aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
  - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

#### c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Ekuitas Pemerintah Pusat.



- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

Adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Pembangunan aset tersebut dapat dikerjakan sendiri (swakelola) maupun dengan menggunakan jasa pihak ketiga melalui kontrak konstruksi. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Kontrak konstruksi dapat meliputi:

    - 1) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
    - 2) Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
    - 3) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*.
    - 4) Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 6  
*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

#### d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan atau dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Piutang jangka Panjang terdiri dari: Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas Negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan (TP), adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi (TGR), adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

#### e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, dan aset lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak

mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 81/KM.6/2018 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat aset tak berwujud pada tabel berikut:

Tabel 7  
*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Prosedur Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

*Kewajiban***(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam dua kewajiban yaitu:
  - a. Kewajiban Jangka Pendek.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang.

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.
- Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

*Ekuitas***(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



*Implementasi  
Akuntansi  
Pemerintah  
Berbasis  
Akrual  
Pertama Kali*

**(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali**

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan.

Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Politeknik Negeri Banyuwangi telah mengadakan revisi sebanyak 18 (delapan belas) kali pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA Awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

URAIAN	DIPA Awal	Rev.1	Rev.2	Rev.3	Rev.4
Pendapatan	25.544.600.000	25.544.600.000	25.544.600.000	25.544.600.000	25.544.600.000
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>25.544.600.000</b>	<b>25.544.600.000</b>	<b>25.544.600.000</b>	<b>25.544.600.000</b>	<b>25.544.600.000</b>
Belanja					
Belanja Pegawai	14.848.752.000	14.848.752.000	14.848.752.000	14.848.752.000	14.848.752.000
Belanja Barang	30.468.674.000	30.468.674.000	30.468.674.000	30.064.076.000	30.247.646.000
Belanja Modal	11.895.518.000	11.895.518.000	11.895.518.000	12.300.116.000	12.616.546.000
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>57.212.944.000</b>	<b>57.212.944.000</b>	<b>57.212.944.000</b>	<b>57.212.944.000</b>	<b>57.712.944.000</b>

URAIAN	Rev.5	Rev.6	Rev.7	Rev.8	Rev.9
Pendapatan	25.544.600.000	25.544.600.000	25.544.600.000	25.544.600.000	25.544.600.000
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>25.544.600.000</b>	<b>25.544.600.000</b>	<b>25.544.600.000</b>	<b>25.544.600.000</b>	<b>25.544.600.000</b>
Belanja					
Belanja Pegawai	14.848.752.000	14.848.752.000	14.848.752.000	14.848.752.000	14.848.752.000
Belanja Barang	30.247.646.000	30.247.646.000	30.247.646.000	31.718.207.000	31.718.207.000
Belanja Modal	12.616.546.000	12.616.546.000	12.616.546.000	18.539.877.000	18.539.877.000
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>57.712.944.000</b>	<b>57.712.944.000</b>	<b>57.712.944.000</b>	<b>65.106.836.000</b>	<b>65.106.836.000</b>

URAIAN	Rev.10	Rev.11	Rev.12	Rev.13	Rev.14
Pendapatan	25.544.600.000	25.544.600.000	25.544.600.000	25.544.600.000	25.544.600.000
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>25.544.600.000</b>	<b>25.544.600.000</b>	<b>25.544.600.000</b>	<b>25.544.600.000</b>	<b>25.544.600.000</b>
Belanja					
Belanja Pegawai	14.848.752.000	14.848.752.000	14.848.752.000	14.848.752.000	14.848.752.000
Belanja Barang	31.728.207.000	31.728.207.000	29.942.169.000	29.942.169.000	29.942.169.000
Belanja Modal	18.539.877.000	18.539.877.000	20.325.915.000	21.323.755.000	21.323.755.000
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>65.116.836.000</b>	<b>65.116.836.000</b>	<b>65.116.836.000</b>	<b>66.114.676.000</b>	<b>66.114.676.000</b>

URAIAN	Rev.15	Rev.16	Rev.17	Rev.18
Pendapatan	25.544.600.000	25.544.600.000	25.544.600.000	25.544.600.000
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>25.544.600.000</b>	<b>25.544.600.000</b>	<b>25.544.600.000</b>	<b>25.544.600.000</b>
Belanja				
Belanja Pegawai	14.848.752.000	14.848.752.000	16.596.009.000	16.596.009.000
Belanja Barang	29.942.169.000	29.942.169.000	29.942.169.000	29.942.169.000
Belanja Modal	21.323.755.000	21.323.755.000	21.323.755.000	21.323.755.000
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>66.114.676.000</b>	<b>66.114.676.000</b>	<b>67.861.933.000</b>	<b>67.861.933.000</b>

Sehingga perbandingan Anggaran Semula (DIPA Awal) dengan Anggaran Akhir (Rev. 18) dapat dilihat pada tabel berikut:

URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN AKHIR	NAIK (TURUN)
Pendapatan	25.544.600.000	25.544.600.000	0
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>25.544.600.000</b>	<b>25.544.600.000</b>	<b>0</b>
Belanja			
Belanja Pegawai	14.848.752.000	16.596.009.000	1.747.257.000
Belanja Barang	30.468.674.000	29.942.169.000	(526.505.000)
Belanja Modal	11.895.518.000	21.323.755.000	9.428.237.000
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>57.212.944.000</b>	<b>67.861.933.000</b>	<b>10.648.989.000</b>

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa:

1. Penambahan pagu sebesar Rp1.747.257.000,- pada Belanja Pegawai karena kenikan tarif gaji pokok atas ASN sesuai Peraturan Pemerintah No. 5 dan 11 Tahun 2024, bertambahnya jumlah ASN dan perubahan status dari CPNS menjadi PNS;
2. Pengurangan belanja barang sebesar Rp526.505.000,-, merupakan hasil optimalisasi kegiatan yang dialokasikan untuk pemenuhan belanja sarana pendukung pembelajaran; dan
3. Penambahan pagu Belanja Modal sebesar Rp9.428.237.000,- karena adanya pemenuhan belanja sarana pendukung pembelajaran, realokasi program *Competitive Fund* (CF), program Dana Padanan (*Matching Fund*), program Antisipasi Perubahan Iklim (API) Sarpras dan Insentif IKU, serta MLP (Modernisasi Laboratorium).

#### *Pendapatan*

*Rp23.572.136.161,-*

### **B.1. Pendapatan**

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp23.572.136.161,- atau mencapai 92,28% dari estimasi pendapatan sebesar Rp25.544.600.000,-.

#### *Penerimaan Negara Bukan Pajak*

*Rp23.572.136.161,-*

### **B.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak**

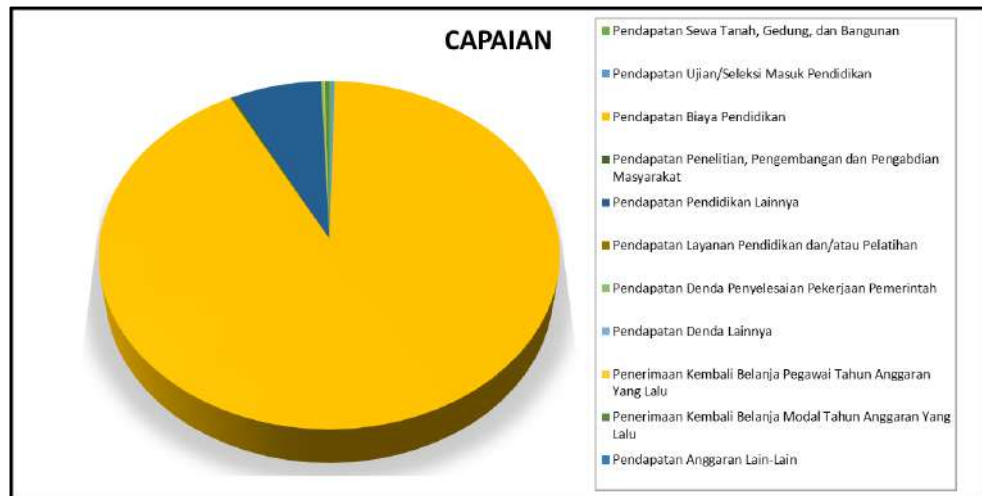
Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp23.572.136.161,- atau mencapai 92,28% dari estimasi pendapatan sebesar Rp25.544.600.000,-. Secara rinci, Pendapatan Politeknik Negeri Banyuwangi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8  
Rincian Estimasi dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak  
per 31 Desember 2024

URAIAN	31 DESEMBER 2024		SELISIH	%
	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN		
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	38.270.000	(38.270.000)	0,00
Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	64.000.000	64.000.000	0	100,00
Pendapatan Biaya Pendidikan	24.119.777.000	21.649.887.500	2.469.889.500	89,76
Pendapatan Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat	50.000.000	44.144.144	5.855.856	88,29
Pendapatan Pendidikan Lainnya	1.300.923.000	1.628.106.375	(327.183.375)	125,15
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	9.900.000	3.200.000	6.700.000	32,32
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	46.653.115	(46.653.115)	0,00
Pendapatan Denda Lainnya	0	1.396.950	(1.396.950)	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	16.380.000	(16.380.000)	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	71.164.684	(71.164.684)	0,00
Pendapatan Anggaran Lain-Lain	0	8.933.393	(8.933.393)	0,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>25.544.600.000</b>	<b>23.572.136.161</b>	<b>1.972.463.839</b>	<b>92,28</b>

Komposisi Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak dapat dilihat dalam grafik berikut:

Grafik 1  
Komposisi Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak  
per 31 Desember 2024



Berdasarkan tabel dan grafik di atas diketahui bahwa realisasi Pendapatan terbesar diperoleh dari Pendapatan Biaya Pendidikan dengan realisasi sebesar Rp21.649.887.500,- atau 91,85% dari total Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak. Pendapatan Negara Politeknik Negeri Banyuwangi sampai dengan 31 Desember 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 9  
Penjelasan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak  
per 31 Desember 2024

URAIAN	REALISASI PENDAPATAN	KETERANGAN
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	38.270.000	Sewa sebagian lahan tanah untuk ATM BNI dan kantin, lahan tanah dan bangunan gedung untuk ATM Bank Mandiri, ATM BSI dan Koperasi, serta sewa Laboratorium.
Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	64.000.000	Pendapatan dari ujian/seleksi masuk pendidikan melalui jalur SNBP, SNBT, Mandiri S2MB, Mandiri Konsorsium, Mandiri UTBK dan Mandiri Pertanian Politeknik Negeri Banyuwangi.
Pendapatan Biaya Pendidikan	21.649.887.500	Pendapatan dari Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Pendapatan Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat	44.144.144	Pendapatan atas program penelitian dan pengembangan daerah untuk pengembangan inovasi dan teknologi dengan Pemkab. Banyuwangi.
Pendapatan Pendidikan Lainnya	1.628.106.375	Pendapatan dari Iuran Pengembangan Institusi (IPI); hasil praktikum Program Studi Agribisnis, Jurusan Teknik Sipil, dan Jurusan Pariwisata serta pendapatan denda atas keterlambatan pengembalian pinjaman buku serta Pendapatan dari Tes Toefl oleh Mahasiswa.
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	3.200.000	Pendapatan dari tes TOEFL oleh mahasiswa.
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	46.653.115	Pendapatan atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh penyedia/rekanan.
Pendapatan Denda Lainnya	1.396.950	Pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran sewa lahan untuk ATM, Koperasi dan Kantin.
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	16.380.000	Pengembalian Belanja Pegawai yang menjalani Tugas Belajar atas kelebihan/keterlambatan pembayaran Tunjangan Fungsional dan Tunjangan Umum.
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	71.164.684	Pengembalian belanja modal atas kelebihan pembayaran Biaya Perjalanan Dinas, kelebihan pembayaran Biaya Overtime, kelebihan pembayaran Item Pekerjaan dengan Harga Satuan Timpang pada Paket Pekerjaan Konstruksi dan kelebihan pembayaran atas Kekurangan Volume Pekerjaan pada Paket Pekerjaan Konstruksi Gedung Kuliah Terpadu SBSN 2023 Politeknik Negeri Banyuwangi.
Pendapatan Anggaran Lain-Lain	8.933.393	Pendapatan pengembalian denda keterlambatan pengumpulan laporan penelitian.
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>23.572.136.161</b>	

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 pada tabel berikut:

Tabel 10  
Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak  
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	SELISIH	% NAIK (TURUN)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	71.222.222	(71.222.222)	(100,00)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	38.270.000	44.714.500	(6.444.500)	(14,41)
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	0	400.000	(400.000)	(100,00)
Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	64.000.000	75.600.000	(11.600.000)	(15,34)
Pendapatan Biaya Pendidikan	21.649.887.500	20.491.184.500	1.158.703.000	5,65
Pendapatan Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat	44.144.144	0	44.144.144	100,00
Pendapatan Pendidikan Lainnya	1.628.106.375	1.236.734.500	391.371.875	31,65
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	3.200.000	0	3.200.000	100,00
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	46.653.115	18.164.390	28.488.725	156,84
Pendapatan Denda Lainnya	1.396.950	0	1.396.950	100,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	16.380.000	2.089.292	14.290.708	684,00
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	71.164.684	0	71.164.684	100,00
Pendapatan Anggaran Lain-Lain	8.933.393	0	8.933.393	100,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>23.572.136.161</b>	<b>21.940.109.404</b>	<b>1.632.026.757</b>	<b>7,44</b>

Berdasarkan tabel di atas, penerimaan Negara bukan pajak yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp23.572.136.161,- atau mengalami kenaikan sebesar 7,44% dibandingkan dengan realisasi penerimaan Negara bukan pajak per tanggal 31 Desember 2023 yang sebesar Rp21.940.109.404,-. Hal ini disebabkan antara lain:

- Terdapat penurunan sebesar 100% atau senilai Rp72.222.222,- pada Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin dikarenakan di tahun

- 2024 tidak ada peralatan dan mesin yang dijual untuk kemudian menghasilkan pendapatan.
- b) Terdapat penurunan sebesar 14,41% atau senilai Rp6.444.500,- pada Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan karena berkurangnya intensitas penyewaan Laboratorium dan aula oleh pihak luar di tahun 2024.
  - c) Terdapat penurunan sebesar 100% atau senilai Rp400.000,- pada Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya karena di tahun 2024 tidak terdapat transaksi yang berimplikasi pada akun tersebut.
  - d) Terdapat penurunan sebesar 15,34% atau senilai Rp11.600.000,- pada Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan karena adanya ujian Mandiri Pertanian yang biaya pendaftarannya digratiskan karena kurangnya serapan mahasiswa terhadap prodi tersebut.
  - e) Terdapat kenaikan sebesar 5,65% atau senilai Rp1.158.703.000,- pada Pendapatan Biaya Pendidikan karena kenaikan jumlah mahasiswa pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023.
  - f) Terdapat kenaikan sebesar 100% atau sebesar Rp44.144.144,- pada Pendapatan Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat karena pada tahun 2024 Politeknik Negeri Banyuwangi mendapat program penelitian dan pengembangan daerah untuk pengembangan inovasi dan teknologi dengan Pemkab. Banyuwangi.
  - g) Terdapat kenaikan sebesar 31,65% atau sebesar Rp 391.371.875,- pada Pendapatan Pendidikan Lainnya karena kenaikan jumlah mahasiswa pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023.
  - h) Terdapat kenaikan sebesar 100% atau sebesar Rp3.200.000,- pada Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan karena pada tahun 2024 akun ini digunakan untuk menampung pendapatan dari tes TOEFL mahasiswa, yang sebelumnya di tahun 2023 tidak menggunakan akun ini.
  - i) Terdapat kenaikan sebesar 156,84% atau sebesar Rp 28.488.725,- pada Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah karena intensitas keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh

- penyedia/rekanan yang lebih tinggi pada tahun 2024 dibanding tahun 2023.
- j) Terdapat kenaikan sebesar 100% atau sebesar Rp1.396.950,- pada Pendapatan Denda Lainnya karena pada tahun 2024 ini terdapat pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran sewa lahan untuk ATM, Koperasi dan Kantin.
- k) Terdapat kenaikan sebesar 684,00% atau sebesar Rp 14.290.708,- pada Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu karena pada tahun 2024 terdapat Pengembalian Tunjangan Fungsional dan Tunjangan Umum atas pegawai yang menjalani Tugas belajar masing-masing sebesar Rp11.200.000,- dan Rp5.180.000,-
- l) Terdapat kenaikan sebesar 100% atau sebesar Rp71.164.684,- pada Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu karena pada tahun 2024 antara lain karena:
- Kelebihan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp5.025.700,- pekerjaan konstruksi Gedung Kuliah Terpadu SBSN 2023 Politeknik Negeri Banyuwangi
  - Kelebihan Pembayaran Biaya Overtime sebesar Rp5.141.850,- pekerjaan konstruksi Gedung Kuliah Terpadu SBSN 2023 Politeknik Negeri Banyuwangi
  - Kelebihan Pembayaran Item Pekerjaan dengan Harga Satuan Timpang pada pekerjaan konstruksi Gedung Kuliah Terpadu SBSN 2023 Politeknik Negeri Banyuwangi sebesar Rp28.891.373,-
  - Kekurangan Volume Pekerjaan pada pekerjaan konstruksi Gedung Kuliah Terpadu SBSN 2023 Politeknik Negeri Banyuwangi sebesar Rp32.105.761,-
- m) Terdapat kenaikan sebesar 100% atau sebesar Rp8.933.393,- pada Pendapatan Anggaran Lain-Lain karena pada tahun 2024 terdapat pengembalian denda keterlambatan pengumpulan laporan penelitian.

Terlampir pada lampiran untuk bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).

*Realisasi Belanja*  
*Rp62.846.068.165,-*

### B.2. Belanja

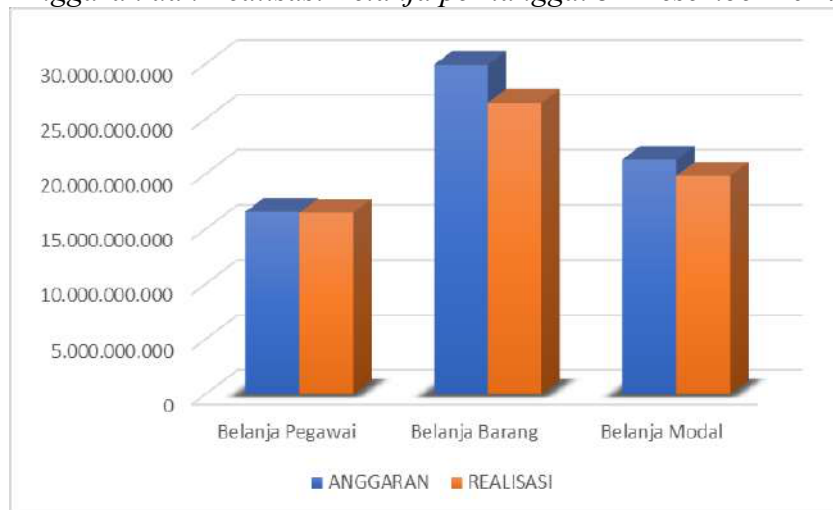
Realisasi Belanja Politeknik Negeri Banyuwangi per tanggal 31 Desember 2024 adalah sejumlah Rp62.846.068.165,- atau sebesar 92,61% dari anggaran sejumlah Rp67.861.933.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 tersaji pada tabel di bawah ini:

*Tabel 11*  
*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja*  
*per 31 Desember 2024*

URAIAN	31 DESEMBER 2024		SELISIH	%
	ANGGARAN	REALISASI		
Belanja Pegawai	16.596.009.000	16.511.965.880	84.043.120	99,49
Belanja Barang	29.942.169.000	26.491.663.788	3.450.505.212	88,48
Belanja Modal	21.323.755.000	19.842.438.497	1.481.316.503	93,05
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>67.861.933.000</b>	<b>62.846.068.165</b>	<b>5.015.864.835</b>	<b>92,61</b>

Komposisi realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut:

*Grafik 2*  
*Anggaran dan Realisasi Belanja per tanggal 31 Desember 2024*



Berdasarkan tabel dan grafik di atas, dapat diketahui bahwa jumlah realisasi belanja terbesar diperoleh dari belanja barang dengan realisasi mencapai Rp26.491.663.788,-. Sedangkan untuk serapan anggaran teroptimal adalah pada belanja pegawai dengan serapan sebesar 99,49%.

Berikut disajikan rincian realisasi belanja menurut sumber dana per jenis belanja sampai dengan 31 Desember 2024 pada tabel sebagai berikut:

*Tabel 12*  
*Realisasi Belanja menurut Sumber Dana per Jenis Belanja per 31 Desember 2024*

URAIAN	31 DESEMBER 2024		SELISIH	%
	ANGGARAN	REALISASI		
<b>Rupiah Murni (RM)</b>				
Belanja Pegawai	16.596.009.000	16.511.965.880	84.043.120	99,49
Belanja Barang	13.308.321.000	12.374.490.334	933.830.666	92,98
Belanja Modal	12.668.449.000	11.705.613.054	962.835.946	92,40
<b>Jumlah Rupiah Murni (RM)</b>	<b>42.572.779.000</b>	<b>40.592.069.268</b>	<b>1.980.709.732</b>	<b>95,35</b>
<b>PNBP</b>				
Belanja Barang	16.633.848.000	14.117.173.454	2.516.674.546	84,87
Belanja Modal	8.655.306.000	8.136.825.443	518.480.557	94,01
<b>Jumlah PNPB</b>	<b>25.289.154.000</b>	<b>22.253.998.897</b>	<b>3.035.155.103</b>	<b>88,00</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>67.861.933.000</b>	<b>62.846.068.165</b>	<b>5.015.864.835</b>	<b>92,61</b>

Pada tabel berikut disajikan rincian realisasi belanja menurut program dan kegiatan sampai dengan 31 Desember 2024:

*Tabel 13*  
*Rincian Realisasi Belanja menurut Program dan Kegiatan per 31 Desember 2024*

PROGRAM DAN KEGIATAN	31 DESEMBER 2024		SELISIH	%
	ANGGARAN	REALISASI		
<b>01 Rupiah Murni (RM)</b>				
<b>DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi</b>				
4466 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Vokasi	11.183.291.000	10.956.970.698	226.320.302	97,98
4467 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi	9.356.196.000	8.418.846.404	937.349.596	89,98
6700 Pembinaan Pendidikan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 6700 Pendidikan Tinggi Vokasi	671.104.000	535.918.346	135.185.654	79,86
6701 Pengembangan Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi	500.000.000	472.345.017	27.654.983	94,47
<b>WA Program Dukungan Manajemen</b>				
4261 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	20.862.188.000	20.207.988.803	654.199.197	96,86
<b>04 PNPB</b>				
<b>DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi</b>				
4467 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi	25.289.154.000	22.253.998.897	3.035.155.103	88,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>67.861.933.000</b>	<b>62.846.068.165</b>	<b>5.015.864.835</b>	<b>92,61</b>

Rincian realisasi belanja untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat dijabarkan pada tabel berikut:

*Tabel 14*  
*Perbandingan Realisasi Belanja*  
*per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	% NAIK (TURUN)
Belanja Pegawai	16.511.965.880	13.437.083.695	3.074.882.185	22,88
Belanja Barang	26.491.663.788	22.052.258.494	4.439.405.294	20,13
Belanja Modal	19.842.438.497	101.576.340.620	(81.733.902.123)	(80,47)
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>62.846.068.165</b>	<b>137.065.682.809</b>	<b>(74.219.614.644)</b>	<b>(54,15)</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa rincian realisasi belanja untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 54,15% atau senilai Rp74.219.614.644,- dibandingkan realisasi belanja untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Terdapat kenaikan pada Belanja Pegawai sebesar 22,88% atau senilai Rp3.074.882.185,- dikarenakan di tahun 2024 terdapat kenaikan tarif gaji pokok atas PNS dan PPPK sesuai Peraturan Pemerintah No. 5 dan 11 Tahun 2024, serta penambahan jumlah pegawai sebanyak 33 CPNS dan 13 PPPK.
2. Terdapat kenaikan pada Belanja Barang sebesar 20,13% atau senilai Rp4.439.405.294,-; dengan kontribusi terbesar atas kenaikan pada belanja barang non operasional dan pemeliharaan karena adanya Program reakreditasi, praktisi mengajar, Program *Matching Fund* (MF), pemeliharaan terhadap hotel Jinggo dan intensitas kegiatan yang lebih tinggi dibanding tahun 2023.
3. Terdapat penurunan pada Belanja Modal sebesar 80,47% atau senilai Rp81.733.902.123,- dikarenakan di tahun 2023 Politeknik Negeri Banyuwangi mendapatkan SBSN Gedung Kuliah Terpadu, sedangkan di tahun 2024 tidak. Penurunan realisasi pada jenis belanja modal inilah yang memiliki kontribusi terbesar terhadap penurunan jumlah realisasi *year on year*.

**Belanja Pegawai**  
**Rp16.511.965.880,-****B.2.1 Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai Politeknik Negeri Banyuwangi per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp16.511.965.880,- dan Rp13.437.083.695,-. Rincian realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat dijabarkan pada tabel berikut:

*Tabel 15*  
*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai*  
*per 31 Desember 2024*

URAIAN 2024	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	% NAIK (TURUN)
Belanja Gaji Pokok PNS	5.383.862.320	4.458.220.760	925.641.560	20,76
Belanja Pembulatan Gaji PNS	92.038	93.157	(1.119)	(1,20)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	399.020.100	331.765.156	67.254.944	20,27
Belanja Tunj. Anak PNS	90.752.693	73.159.500	17.593.193	24,05
Belanja Tunj. Fungsional PNS	703.000.000	581.335.000	121.665.000	20,93
Belanja Tunj. PPh PNS	34.305.735	2.514.200	31.791.535	1.264,48
Belanja Tunj. Beras PNS	314.447.640	282.003.480	32.444.160	11,50
Belanja Uang Makan PNS	782.819.000	754.814.000	28.005.000	3,71
Belanja Tunjangan Umum PNS	99.665.000	114.095.000	(14.430.000)	(12,65)
Belanja Tunjangan Profesi Dosen	2.286.037.800	1.387.791.950	898.245.850	64,72
Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	337.955.700	287.001.000	50.954.700	17,75
Belanja Gaji Pokok PPPK	2.118.241.900	1.738.862.600	379.379.300	21,82
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	46.351	32.791	13.560	41,35
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	142.071.900	108.045.900	34.026.000	31,49
Belanja Tunjangan Anak PPPK	45.748.634	36.254.924	9.493.710	26,19
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	248.885.000	203.020.000	45.865.000	22,59
Belanja Tunjangan Beras PPPK	110.657.760	91.176.780	19.480.980	21,37
Belanja Uang Makan PPPK	257.979.000	218.381.000	39.598.000	18,13
Belanja Uang Lembur	47.612.000	28.634.000	18.978.000	66,28
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1.877.373.825	1.730.153.527	147.220.298	8,51
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK)	1.235.281.048	1.019.913.245	215.367.803	21,12
<b>Jumlah Belanja Pegawai</b>	<b>16.515.855.444</b>	<b>13.447.267.970</b>	<b>3.068.587.474</b>	<b>22,82</b>
Pengembalian Belanja	3.889.564	10.184.275	(6.294.711)	(61,81)
<b>Jumlah Belanja Pegawai</b>	<b>16.511.965.880</b>	<b>13.437.083.695</b>	<b>3.074.882.185</b>	<b>22,88</b>

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa realisasi belanja pegawai yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp3.074.882.185,- atau sejumlah 22,88% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kenaikan realisasi Belanja Gaji pada komponen Belanja Gaji Pokok PNS dan PPPK, Belanja Tunj. Suami/Istri PNS dan PPPK, Belanja Tunj. Anak PNS dan PPPK, Belanja Tunj. Beras PNS dan PPPK, serta Belanja Uang Makan PNS dan PPPK dikarenakan bertambahnya jumlah PNS dan PPPK berikut anggota keluarganya pada tahun 2024, dapat dijabarkan sebagaimana berikut:

URAIAN 2024	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
<b>PNS</b>			
Jumlah PNS	143	110	33
Jumlah Suami/Istri	99	81	18
Jumlah Anak	113	90	23
	<b>355</b>	<b>281</b>	<b>74</b>
<b>PPPK</b>			
Jumlah PPPK	46	33	13
Jumlah Suami/Istri	31	22	9
Jumlah Anak	52	35	17
	<b>129</b>	<b>90</b>	<b>39</b>
<b>Total</b>	<b>484</b>	<b>371</b>	<b>226</b>

- b. Kenaikan realisasi Belanja Gaji pada komponen Belanja Tunjangan Fungsional PNS dan PPPK dikarenakan penambahan jumlah PNS dan PPPK pada tahun 2024 serta perubahan besaran tunjangan fungsional ke jenjang yang lebih tinggi yakni dari Asisten Ahli ke Lektor. Dapat dijabarkan sebagai berikut:

Uraian Fungsional PNS dan PPPK	PNS			PPPK		
	2024	2023	Selisih	2024	2023	Selisih
Lektor Kepala	2	2	0	0	0	0
Lektor	40	40	0	5	0	5
Asisten Ahli	22	22	0	21	14	7
Lektor sbg Pembantu Dekan/Ketua Sekolah Tinggi /Dir. Poltek/ Dir.Akademi	1	1	0	0	0	0
Lektor sebagai Pembantu Ketua/Pembantu Direktur	2	2	0	0	0	0
Pranata Labolatorium Pendidikan Pertama	8	8	0	3	3	0
Pranata Labolatorium Pendidikan Pelaksana Lanjutan	1	1	0	0	0	0
Pranata Labolatorium Pendidikan Pelaksana	1	1	0	1	1	0
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1	1	0	0	0	0
Pelaksana	65	31	34	0	0	0
Arsiparis Pertama	0	0	0	11	11	0
Arsiparis Terampil	0	0	0	4	3	1
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	0	0	0	1	1	0
<b>Total</b>	<b>143</b>	<b>109</b>	<b>34</b>	<b>46</b>	<b>33</b>	<b>13</b>

1. Kenaikan realisasi Belanja Gaji pada komponen Belanja Tunj. PPh PNS sebesar 1.264,48% dikarenakan di tahun 2024 dilakukan sinkronisasi pembayaran Tunjangan Kinerja untuk PNS pada aplikasi pengelolaan gaji web.
2. Kenaikan realisasi Belanja Gaji pada komponen Belanja Tunjangan Profesi Dosen sejumlah 64,72% dan Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS sejumlah 17,75% dikarenakan pada tahun 2024 terdapat pembayaran Tunjangan Profesi ke-13 dan ke-14 sejumlah 100%, dibanding tahun 2023 yang hanya 50%. Selain itu juga karena

terhitung mulai periode pembayaran Agustus 2024 terdapat perubahan besaran tunjangan per pegawai yang sebelumnya menggunakan acuan gaji pokok BKD semester yang lalu, menjadi gaji pokok pada saat tanggal pembayaran Tunjangan Profesi.

3. Kenaikan realisasi Belanja Gaji pada komponen Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) sebesar 8,51% dan Belanja Pegawai Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK) sebesar 21,12% dikarenakan pada tahun 2024 terdapat pembayaran Tunjangan Kinerja ke-13 dan ke-14 sejumlah 100%, dibanding tahun 2023 yang hanya 50%.
4. Pada belanja pegawai terdapat pengembalian belanja pegawai PNS dan PPPK sebesar Rp3.889.564,- terdiri dari:
  - Belanja pembulatan gaji PNS sebesar Rp3.952,-
  - Belanja tunjangan umum PNS sebesar Rp3.885.000,- karena terkait pembayaran kekurangan gaji atas perubahan jabatan dari yang sebelumnya pelaksana menjadi memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli.
  - Belanja pembulatan gaji PPPK sebesar Rp612,-

Selanjutnya rincian realisasi belanja pegawai yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16  
Realisasi Belanja Pegawai  
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	31 DESEMBER 2024		SELISIH	%
	ANGGARAN	REALISASI		
Belanja Gaji Pokok PNS	5.388.865.000	5.383.862.320	5.002.680	99,91
Belanja Pembulatan Gaji PNS	122.000	92.038	29.962	75,44
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	399.021.000	399.020.100	900	100,00
Belanja Tunj. Anak PNS	90.755.000	90.752.693	2.307	100,00
Belanja Tunj. Struktural PNS	12.000	0	12.000	0,00
Belanja Tunj. Fungsional PNS	703.350.000	703.000.000	350.000	99,95
Belanja Tunj. PPh PNS	34.307.000	34.305.735	1.265	100,00
Belanja Tunj. Beras PNS	314.450.000	314.447.640	2.360	100,00
Belanja Uang Makan PNS	805.997.000	782.819.000	23.178.000	97,12
Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT	375.000	0	375.000	0,00
Belanja Tunjangan Umum PNS	99.675.000	99.665.000	10.000	99,99
Belanja Tunjangan Profesi Dosen	2.286.816.000	2.286.037.800	778.200	99,97
Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	339.228.000	337.955.700	1.272.300	99,62
Belanja Gaji Pokok PPPK	2.120.243.000	2.118.241.900	2.001.100	99,91
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	50.000	46.351	3.649	92,70
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	142.074.000	142.071.900	2.100	100,00
Belanja Tunjangan Anak PPPK	45.836.000	45.748.634	87.366	99,81
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	248.895.000	248.885.000	10.000	100,00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	110.894.000	110.657.760	236.240	99,79
Belanja Uang Makan PPPK	274.662.000	257.979.000	16.683.000	93,93
Belanja Uang Lembur	59.150.000	47.612.000	11.538.000	80,49
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1.891.090.000	1.877.373.825	13.716.175	99,27
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK)	1.240.142.000	1.235.281.048	4.860.952	99,61
<b>Jumlah Belanja Pegawai</b>	<b>16.596.009.000</b>	<b>16.515.855.444</b>	<b>80.153.556</b>	<b>99,52</b>
Pengembalian Belanja	0	3.889.564	(3.889.564)	(100,00)
<b>Jumlah Belanja Pegawai</b>	<b>16.596.009.000</b>	<b>16.511.965.880</b>	<b>84.043.120</b>	<b>99,49</b>

**Belanja Barang**

**Rp26.491.663.788,-**

**B.2.2. Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp26.491.663.788,- atau mencapai 88,48% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp29.942.169.000. Rincian realisasi per jenis komponen belanja barang dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 17  
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang  
per 31 Desember 2024

URAIAN	31 DESEMBER 2024		SELISIH	% REALISASI BELANJA
	ANGGARAN	REALISASI		
Belanja Barang Operasional	9.754.376.000	7.956.973.986	1.797.402.014	81,57
Belanja Barang Non Operasional	12.970.998.000	12.369.508.850	601.489.150	95,36
Belanja Barang Persediaan	1.140.288.000	1.137.519.010	2.768.990	99,76
Belanja Jasa	1.131.625.000	1.091.770.091	39.854.909	96,48
Belanja Pemeliharaan	2.656.732.000	2.445.985.239	210.746.761	92,07
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.288.150.000	1.548.977.723	739.172.277	67,70
<b>Jumlah Belanja Barang</b>	<b>29.942.169.000</b>	<b>26.550.734.899</b>	<b>3.391.434.101</b>	<b>88,67</b>
Pengembalian Belanja Barang	0	59.071.111	(59.071.111)	(100,00)
<b>Jumlah Belanja Barang (Netto)</b>	<b>29.942.169.000</b>	<b>26.491.663.788</b>	<b>3.450.505.212</b>	<b>88,48</b>

Rincian atas tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Belanja Barang Operasional

RINCIAN BELANJA BARANG OPERASIONAL	31 DESEMBER 2024		SELISIH	% REALISASI BELANJA
	ANGGARAN	REALISASI		
Belanja Keperluan Perkantoran	3.117.576.000	3.099.780.823	17.795.177	99,43
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9.558.000	1.585.800	7.972.200	16,59
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	2.327.800.000	2.220.186.563	107.613.437	95,38
Belanja Barang Operasional Lainnya	4.299.442.000	2.635.420.800	1.664.021.200	61,30
<b>Jumlah Belanja Barang</b>	<b>9.754.376.000</b>	<b>7.956.973.986</b>	<b>1.797.402.014</b>	<b>81,57</b>
Pengembalian Belanja Barang	0	5.470.477	(5.470.477)	0,00
<b>Jumlah Belanja Barang (Netto)</b>	<b>9.754.376.000</b>	<b>7.951.503.509</b>	<b>1.802.872.491</b>	<b>81,52</b>

b. Belanja Barang Non Operasional

RINCIAN BELANJA BARANG NON OPERASIONAL	31 DESEMBER 2024		SELISIH	% REALISASI BELANJA
	ANGGARAN	REALISASI		
Belanja Bahan	1.173.895.000	1.068.200.050	105.694.950	91,00
Belanja Honor Output Kegiatan	3.718.287.000	3.667.263.500	51.023.500	98,63
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	8.062.141.000	7.617.370.300	444.770.700	94,48
Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	16.675.000	16.675.000	0	100,00
<b>Jumlah Belanja Barang</b>	<b>12.970.998.000</b>	<b>12.369.508.850</b>	<b>601.489.150</b>	<b>95,36</b>
Pengembalian Belanja Barang	0	51.801.733	(51.801.733)	0,00
<b>Jumlah Belanja Barang (Netto)</b>	<b>12.970.998.000</b>	<b>12.317.707.117</b>	<b>653.290.883</b>	<b>94,96</b>

c. Belanja Barang Persediaan

RINCIAN BELANJA BARANG PERSEDIAAN	31 DESEMBER 2024		SELISIH	% REALISASI BELANJA
	ANGGARAN	REALISASI		
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1.140.288.000	1.137.519.010	2.768.990	99,76
<b>Jumlah Belanja Barang</b>	<b>1.140.288.000</b>	<b>1.137.519.010</b>	<b>2.768.990</b>	<b>99,76</b>
Pengembalian Belanja Barang	0	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Barang (Netto)</b>	<b>1.140.288.000</b>	<b>1.137.519.010</b>	<b>2.768.990</b>	<b>99,76</b>

d. Belanja Jasa

RINCIAN BELANJA JASA	31 DESEMBER 2024		SELISIH	% REALISASI BELANJA
	ANGGARAN	REALISASI		
Belanja Langganan Listrik	1.080.480.000	1.045.800.091	34.679.909	96,79
Belanja Langganan Telepon	600.000	0	600.000	0,00
Belanja Jasa Profesi	37.200.000	32.625.000	4.575.000	87,70
Belanja Jasa Lainnya	13.345.000	13.345.000	0	100,00
<b>Jumlah Belanja Barang</b>	<b>1.131.625.000</b>	<b>1.091.770.091</b>	<b>39.854.909</b>	<b>96,48</b>
Pengembalian Belanja Barang	0	0	0	(100,00)
<b>Jumlah Belanja Barang (Netto)</b>	<b>1.131.625.000</b>	<b>1.091.770.091</b>	<b>39.854.909</b>	<b>96,48</b>

e. Belanja Pemeliharaan

RINCIAN BELANJA PEMELIHARAAN	31 DESEMBER 2024		SELISIH	% REALISASI BELANJA
	ANGGARAN	REALISASI		
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	431.250.000	358.310.379	72.939.621	83,09
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1.244.800.000	1.239.289.034	5.510.966	99,56
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	656.482.000	536.237.185	120.244.815	81,68
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	305.000.000	293.174.441	11.825.559	96,12
Belanja Pemeliharaan Lainnya	19.200.000	18.974.200	225.800	98,82
<b>Jumlah Belanja Barang</b>	<b>2.656.732.000</b>	<b>2.445.985.239</b>	<b>210.746.761</b>	<b>92,07</b>
Pengembalian Belanja Barang	0	0	0	(100,00)
<b>Jumlah Belanja Barang (Netto)</b>	<b>2.656.732.000</b>	<b>2.445.985.239</b>	<b>210.746.761</b>	<b>92,07</b>

f. Belanja Perjalanan Dalam Negeri

RINCIAN BELANJA PERJALANAN DALAM NEGERI	31 DESEMBER 2024		SELISIH	% REALISASI BELANJA
	ANGGARAN	REALISASI		
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.288.150.000	1.548.977.723	739.172.277	67,70
<b>Jumlah Belanja Barang</b>	<b>2.288.150.000</b>	<b>1.548.977.723</b>	<b>739.172.277</b>	<b>67,70</b>
Pengembalian Belanja Barang	0	1.798.901	(1.798.901)	0,00
<b>Jumlah Belanja Barang (Netto)</b>	<b>2.288.150.000</b>	<b>1.547.178.822</b>	<b>740.971.178</b>	<b>67,62</b>

Adapun perbandingan realisasi belanja barang yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Tabel 18*  
*Realisasi Belanja Barang*  
*per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	% NAIK (TURUN)
Belanja Barang Operasional	7.956.973.986	7.976.941.310	(19.967.324)	(0,25)
Belanja Barang Non Operasional	12.369.508.850	9.217.492.212	3.152.016.638	34,20
Belanja Barang Persediaan	1.137.519.010	1.154.817.621	(17.298.611)	(1,50)
Belanja Jasa	1.091.770.091	881.104.944	210.665.147	23,91
Belanja Pemeliharaan	2.445.985.239	1.238.355.141	1.207.630.098	97,52
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.548.977.723	1.598.510.748	(49.533.025)	(3,10)
<b>Jumlah Belanja Barang</b>	<b>26.550.734.899</b>	<b>22.067.221.976</b>	<b>4.483.512.923</b>	<b>20,32</b>
Pengembalian Belanja Barang	59.071.111	14.963.482	44.107.629	294,77
<b>Jumlah Belanja Barang (Netto)</b>	<b>26.491.663.788</b>	<b>22.052.258.494</b>	<b>4.439.405.294</b>	<b>20,13</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa perbandingan realisasi belanja barang bersih yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 20,13% atau senilai Rp4.439.405.294,- dibandingkan dengan periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023. Dapat diuraikan sebagai berikut:

- Kenaikan sebesar 34,20% atau senilai Rp3.152.016.638,- pada Belanja Barang Non Operasional Karena terdapat tambahan anggaran untuk Program reakreditasi, praktisi mengajar dan Program *Matching Fund* (MF) dan intensitas kegiatan yang lebih tinggi dibanding tahun 2023.
- Kenaikan sejumlah 97,52% atau senilai Rp 1.207.630.098,- pada Belanja Pemeliharaan karena pemeliharaan terhadap hotel Jinggo.

*Belanja Modal*  
*Rp19.842.438.497,-*

### **B.2.3. Belanja Modal**

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset tetap lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp19.842.438.497,- atau 93,05% dari alokasi anggaran sebesar Rp21.323.755.000. Rincian atas realisasi belanja modal dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 19  
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal  
per 31 Desember 2024

URAIAN	31 DESEMBER 2024		SELISIH	% REALISASI BELANJA
	ANGGARAN	REALISASI		
Belanja Modal Tanah	1.948.080.000	1.932.690.000	15.390.000	99,21
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.709.331.000	9.411.576.300	1.297.754.700	87,88
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.055.844.000	7.891.668.197	164.175.803	97,96
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	455.000.000	454.083.000	917.000	99,80
Belanja Modal Lainnya	155.500.000	155.421.000	79.000	99,95
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>21.323.755.000</b>	<b>19.845.438.497</b>	<b>1.478.316.503</b>	<b>93,07</b>
Pengembalian Belanja Modal	0	3.000.000	(3.000.000)	0,00
<b>Jumlah Belanja Modal (Netto)</b>	<b>21.323.755.000</b>	<b>19.842.438.497</b>	<b>1.481.316.503</b>	<b>93,05</b>

Adapun perbandingan realisasi belanja modal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp19.842.438.497,- dan Rp101.576.340.620,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 20  
Realisasi Belanja Modal  
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	% NAIK (TURUN)
Belanja Modal Tanah	1.932.690.000	29.949.000	1.902.741.000	6.353,27
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.411.576.300	14.678.897.500	(5.267.321.200)	(35,88)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.891.668.197	75.612.735.741	(67.721.067.544)	(89,56)
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	454.083.000	8.147.045.080	(7.692.962.080)	(94,43)
Belanja Modal Lainnya	155.421.000	3.107.713.299	(2.952.292.299)	(95,00)
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>19.845.438.497</b>	<b>101.576.340.620</b>	<b>(81.730.902.123)</b>	<b>(80,46)</b>
Pengembalian Belanja Modal	3.000.000	0	3.000.000	0,00
<b>Jumlah Belanja Modal (Netto)</b>	<b>19.842.438.497</b>	<b>101.576.340.620</b>	<b>(81.733.902.123)</b>	<b>(80,47)</b>

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 80,47% senilai Rp81.733.902.123,- jika dibandingkan dengan periode 31 Desember 2023.

*Belanja Modal  
Tanah  
Rp1.932.690.000,-*

### B.2.3.1. Belanja Modal Tanah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa perbandingan realisasi Belanja Modal Tanah yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terealisasi sebesar 99,21% atau senilai Rp1.932.690.000,- dibandingkan dengan pagu anggaran yang sebesar Rp1.948.080.000,-. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 21  
Realisasi Belanja Modal Tanah  
per 31 Desember 2024

URAIAN	31 DESEMBER 2024		SELISIH	% REALISASI BELANJA
	ANGGARAN	REALISASI		
Belanja Modal Pembebasan Tanah	1.948.080.000	1.932.690.000	15.390.000	99,21
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>1.948.080.000</b>	<b>1.932.690.000</b>	<b>15.390.000</b>	<b>99,21</b>
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Modal (Netto)</b>	<b>1.948.080.000</b>	<b>1.932.690.000</b>	<b>15.390.000</b>	<b>99,21</b>

Adapun perbandingan realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp1.932.690.000,- dan Rp29.949.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 22  
Realisasi Belanja Modal Tanah  
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	% NAIK (TURUN)
Belanja Modal Pembebasan Tanah	1.932.690.000	29.949.000	1.902.741.000	6.353,27
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>1.932.690.000</b>	<b>29.949.000</b>	<b>1.902.741.000</b>	<b>6.353,27</b>
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Modal (Netto)</b>	<b>1.932.690.000</b>	<b>29.949.000</b>	<b>1.902.741.000</b>	<b>6.353,27</b>

Realisasi Belanja Modal Tanah pada tahun 2024 merupakan belanja atas tanah seluas 2781 m<sup>2</sup> yang akan dipergunakan di dalam kegiatan pembelajaran.

*Belanja Modal  
Peralatan dan  
Mesin  
Rp9.408.576.300,-*

### B.2.3.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp9.408.576.300,- dan Rp14.678.897.500,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 23  
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin  
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	% NAIK (TURUN)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.393.766.300	14.596.097.500	(5.202.331.200)	(35,64)
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	17.810.000	82.800.000	(64.990.000)	(78,49)
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>9.411.576.300</b>	<b>14.678.897.500</b>	<b>(5.267.321.200)</b>	<b>(35,88)</b>
Pengembalian Belanja Modal	3.000.000	0	3.000.000	0,00
<b>Jumlah Belanja Modal (Netto)</b>	<b>9.408.576.300</b>	<b>14.678.897.500</b>	<b>(5.270.321.200)</b>	<b>(35,90)</b>

Adapun perbandingan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin jika dibandingkan dengan pagu anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 24  
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin  
per 31 Desember 2024

URAIAN	31 DESEMBER 2024		SELISIH	% REALISASI BELANJA
	ANGGARAN	REALISASI		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.624.331.000	9.393.766.300	1.230.564.700	88,42
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	85.000.000	17.810.000	67.190.000	20,95
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>10.709.331.000</b>	<b>9.411.576.300</b>	<b>1.297.754.700</b>	<b>87,88</b>
Pengembalian Belanja Modal	0	3.000.000	(3.000.000)	100,00
<b>Jumlah Belanja Modal (Netto)</b>	<b>10.709.331.000</b>	<b>9.408.576.300</b>	<b>1.300.754.700</b>	<b>87,85</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa perbandingan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terealisasi sebesar 87,85% atau senilai Rp 9.408.576.300,- dibandingkan dengan pagu anggaran. Kurang optimalnya realisasi terhadap pagu antara lain dikarenakan kalibrasi peralatan laboratorium yang memiliki serapan kecil.

*Belanja Modal  
Gedung dan  
Bangunan  
Rp7.891.668.197,-*

### B.2.3.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp7.891.668.197,- dan Rp75.612.735.741,- dengan perbandingan realisasi pada tabel berikut:

Tabel 25  
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan  
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	% NAIK (TURUN)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.384.146.371	71.676.771.830	(68.292.625.459)	(95,28)
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	0	224.794.271	(224.794.271)	(100,00)
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	2.222.536.905	(2.222.536.905)	(100,00)
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	4.507.521.826	1.488.632.735	3.018.889.091	202,80
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>7.891.668.197</b>	<b>75.612.735.741</b>	<b>(67.721.067.544)</b>	<b>(89,56)</b>
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Modal (Netto)</b>	<b>7.891.668.197</b>	<b>75.612.735.741</b>	<b>(67.721.067.544)</b>	<b>(89,56)</b>

Adapun perbandingan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan jika dibandingkan dengan pagu anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 26  
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan  
per 31 Desember 2024

URAIAN	31 DESEMBER 2024		SELISIH	% REALISASI BELANJA
	ANGGARAN	REALISASI		
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.396.967.000	3.384.146.371	12.820.629	99,62
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	0	0	0	0,00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0,00
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	4.658.877.000	4.507.521.826	151.355.174	96,75
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>8.055.844.000</b>	<b>7.891.668.197</b>	<b>164.175.803</b>	<b>97,96</b>
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Modal (Netto)</b>	<b>8.055.844.000</b>	<b>7.891.668.197</b>	<b>164.175.803</b>	<b>97,96</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa perbandingan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp7.891.668.197,- atau senilai 97,96% dibandingkan dengan pagu anggaran. Belanja Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan pada tahun 2024 merupakan belanja untuk renovasi laboratorium.

*Belanja Modal  
Jalan, Irigasi dan  
Jaringan  
Rp454.083.000,-*

#### B.2.3.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp454.083.000,- dan Rp8.147.045.080,- dengan perbandingan realisasi sebagai berikut:

Tabel 27  
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan  
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	% NAIK (TURUN)
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	454.083.000	6.063.735.080	(5.609.652.080)	(92,51)
Belanja Modal Jaringan	0	197.820.000	(197.820.000)	(100,00)
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	0	1.885.490.000	(1.885.490.000)	(100,00)
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>454.083.000</b>	<b>8.147.045.080</b>	<b>(7.692.962.080)</b>	<b>(94,43)</b>
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Modal (Netto)</b>	<b>454.083.000</b>	<b>8.147.045.080</b>	<b>(7.692.962.080)</b>	<b>(94,43)</b>

Secara umum penurunan realisasi belanja modal, jalan dan jembatan pada tahun 2024 dikarenakan pada tahun 2023, Politeknik Negeri Banyuwangi mendapatkan SBSN, sedangkan di tahun 2024 tidak. Adapun perbandingan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan jika dibandingkan dengan pagu anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 28  
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan  
per 31 Desember 2024

URAIAN	31 DESEMBER 2024		SELISIH	% REALISASI BELANJA
	ANGGARAN	REALISASI		
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	455.000.000	454.083.000	917.000	99,80
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>455.000.000</b>	<b>454.083.000</b>	<b>917.000</b>	<b>99,80</b>
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Modal (Netto)</b>	<b>455.000.000</b>	<b>454.083.000</b>	<b>917.000</b>	<b>99,80</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar 99,80% atau senilai Rp454.083.000,- dibandingkan dengan pagu anggaran.

*Belanja Modal  
Lainnya  
Rp155.421.000,-*

#### B.2.3.5. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp155.421.000,- dan Rp3.107.713.299,- dengan perbandingan realisasi sebagai berikut:

Tabel 29  
Realisasi Belanja Modal Lainnya  
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	% NAIK (TURUN)
Belanja Modal Lainnya	155.421.000	3.107.713.299	(2.952.292.299)	(95,00)
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>155.421.000</b>	<b>3.107.713.299</b>	<b>(2.952.292.299)</b>	<b>(95,00)</b>
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Modal (Netto)</b>	<b>155.421.000</b>	<b>3.107.713.299</b>	<b>(2.952.292.299)</b>	<b>(95,00)</b>

Adapun perbandingan realisasi Belanja Modal Lainnya jika dibandingkan dengan pagu anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 30  
Realisasi Belanja Modal Lainnya  
per 31 Desember 2024

URAIAN	31 DESEMBER 2024		SELISIH	% REALISASI BELANJA
	ANGGARAN	REALISASI		
Belanja Modal Lainnya	155.500.000	155.421.000	79.000	99,95
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>155.500.000</b>	<b>155.421.000</b>	<b>79.000</b>	<b>99,95</b>
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Modal (Netto)</b>	<b>155.500.000</b>	<b>155.421.000</b>	<b>79.000</b>	<b>99,95</b>



Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa perbandingan realisasi Belanja Lainnya untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar 99,95% atau senilai Rp155.421.000,- dibandingkan dengan pagu anggaran. Akun belanja ini terkait dengan buku pustaka.